

PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DI TAMAN WISATA PERAIRAN PULAU PIEH DAN LAUT SEKITARNYA

MARINE TOURISM DEVELOPMENT IN PARK TOURISM ISLANDS OF PIEH AND SEA SURROUNDING

Diah Yustinaningrum¹⁾

¹⁾Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya Malang
Email : diahyustina@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan wisata alam bahari memiliki peranan yang sangat penting secara ekonomis maupun ekologis. Pengembangan wisata bahari perlu dikelola dengan konsep ekowisata, yaitu pendekatan berkelanjutan yang karakteristiknya adalah pengelolaan bentang alam, pengelolaan budaya masyarakat, dan kegiatan konservasi. Kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh merupakan kawasan konservasi perairan nasional yang terletak di Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.: KEP. 70/MEN/2009 tanggal 3 September 2009. Kawasan ini merupakan habitat penting bagi ekosistem perairan, terutama perairan dangkal, yaitu ekosistem terumbu karang. Selain fungsinya sebagai kawasan konservasi, TWP Pulau Pieh juga merupakan Taman Wisata Perairan. Oleh karena itu, diperlukan konsep pengembangan wisata bahari di TWP Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan dengan tetap memperhatikan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Terdapat 5 (lima) pulau-pulau kecil, yaitu Pulau Air, Pulau Pandan, Pulau Toran, Pulau Pieh dan Pulau Bando yang memiliki, perairan jernih dan pesona bawah laut yang indah yang dapat dinikmati dengan bersnorkeling maupun diving. Namun demikian, aksesibilitas, sarana prasarana pendukung perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepuasan wisatawan. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh difokuskan untuk tujuan wisata bahari berbasis ekowisata atau pariwisata yang ramah lingkungan, dengan memperhatikan aspek *co-ownership*, *co-management*, *co-responsibility* sehingga perlindungan ekosistem kawasan konservasi diharmonisasikan dengan pemanfaatan pariwisata bahari.

Kata kunci: kawasan konservasi, wisata bahari, ekowisata, TWP Pulau Pieh

ABSTRACT

The development of marine tourism has an importance role on economical and ecological aspect. Marine tourism need to be managed with the concept of ecotourism, through sustainability approach which have the characteristic of landscape management, social culture management and conservation activities. Pieh Islands is located at West Sumatera which has assigned as a Marine Protected Area (MPA) through Minister of Marine Affairs and Fisheries Decree No. KEP.70/MEN/2009 on 3 September 2009. The area is critical habitat for

marine ecosystem, especially for the coral reefs ecosystem. Beside as MPA, Pieh Islands is designed as a Marine Tourism Park. Because of that, it will need a concept on how to develop ecotourism in TWP Pieh Islands and the Surrounded Sea. Pieh Islands has five islands, namely Air Island, Pandan Island, Toran Island, Pieh Island, and Bando Island which have clearly water and beautiful underwater scenery that suitable for snorkeling and diving activities. However, the accessibility and infrastructure need to be upgraded to enhance tourist satisfied. The management and utilization of Pieh MPA focus on ecotourism and sustainable tourism which concerned on aspect of co-ownership, co-management, co-responsibility so the protection of marine protected area and marine tourism activities can be in harmonize.

Keywords : *marine protected area, marine tourism, ecotourism, Pulau Pieh MPA*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial. Terumbu karang Indonesia menyumbang sebanyak 21% kekayaan terumbu karang dunia dan 75% jenis karang di dunia dapat ditemui di Indonesia. Salah satu jasa lingkungan kelautan yang sangat prospektif mendukung perekonomian nasional adalah pengembangan pariwisata bahari. Skala nasional menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berasal dari wisata bahari memberikan dampak positif bagi neraca keuangan negara, baik dari sisi pendapatan domestik maupun nasional atau *Gross National Product* (GNP).

Indonesia dapat menjadi tujuan wisata bahari terbesar di dunia

dengan basis *Marine Ecotourism*. Menurut World Tourism Center, prediksi pariwisata Indonesia terhadap GNP tahun 2007 adalah 10,1%. Jumlah tersebut setara dengan US\$ 67 miliar, dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sekitar 8,5 juta orang (maritimemagz.com, 2014). *Marine ecotourism* khususnya pengembangan wisata bahari di pulau-pulau kecil (PPK) termasuk kawasan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) dapat menjadi wisata unggulan, seperti kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya.

Taman Wisata Perairan (TWP) ini berada di pesisir barat perairan Provinsi Sumatera Barat. Kawasan ini merupakan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang

telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Kep. 70/Men/2009 tentang Kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya. Kawasan ini memiliki luas 39.900 hektar terdiri dari 5 pulau kecil tidak berpenghuni dan rangkaian gosong karang yang tersebar memanjang dari utara-selatan, sejajar garis pantai pesisir Sumatera Barat. TWP Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya merupakan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), hampir semua pulau menjadi titik penyelaman wisata dengan perairan yang jernih, pantai berpasir putih dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi (COREMAP CTI LIPI, 2014). Jajaran terumbu karang ini membentuk *landscape* bawah laut yang mempesona sekaligus sebagai tempat perlindungan dan berkembang biak ratusan spesies ikan. Kumpulan dari ikan dan biota laut ini merupakan potensi yang harus dilindungi sehingga ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan. TWP ini merupakan kawasan konservasi perairan dengan tujuan

untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.

Pengembangan wisata alam bahari memiliki peranan yang sangat penting secara ekonomis maupun ekologis. Secara ekonomis, pengembangan wisata bahari berperan dalam peningkatan pendapatan devisa negara dan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Secara ekologis, pemanfaatan kawasan untuk wisata bahari ini dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut jika tidak dikelola dengan benar. Pengembangan wisata bahari perlu dikelola dengan konsep ekowisata, yaitu pendekatan berkelanjutan yang karakteristiknya adalah pengelolaan bentang alam diarahkan pada pelestarian sumberdaya, pengelolaan budaya masyarakat diarahkan pada kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan konservasi diarahkan pada upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumberdaya untuk masa kini dan masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan konsep pengembangan wisata bahari di TWP Pulau Pieh dan laut di sekitarnya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan dengan tetap memperhatikan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menjabarkan konsep pengembangan wisata bahari di Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh dan laut di sekitarnya untuk dapat menjadi destinasi wisata bahari unggulan dengan tetap memperhatikan pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata (*tourism*) sering diasosiasikan sebagai rangkaian perjalanan seseorang atau kelompok orang (wisatawan, turis) ke suatu tempat untuk berlibur, menikmati keindahan alam dan budaya (*sightseeing*), bisnis, mengunjungi kerabat dan tujuan lainnya (Ramly, 2007). Wisata merupakan bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang mengandalkan jasa alam untuk kepuasan manusia. Menurut Munasef (1995) diacu dalam Sulaksmi (2007), kegiatan pariwisata terdiri dari tiga unsur utama. Tiga unsur tersebut diantaranya:

1. Manusia (*man*) yang merupakan orang yang melakukan perjalanan

- dengan maksud menikmati keindahan dari suatu tempat (alam);
2. Ruang (*space*) yang merupakan daerah atau ruang lingkup tempat melakukan perjalanan;
3. Waktu (*time*) yang merupakan waktu yang digunakan selama dalam perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata.

Pengembangan kawasan wisata merupakan alternatif yang diharapkan mampu mendorong baik potensi ekonomi maupun upaya pelestarian. Pengembangan kawasan wisata dilakukan dengan menata kembali berbagai potensi dan kekayaan alam dan hayati secara terpadu. Pada tahap berikutnya dikembangkan model pengelolaan kawasan wisata yang berorientasi pelestarian lingkungan (Ramly, 2007).

Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan pada empat prinsip dasar, sebagaimana dikemukakan Purwanto (2002), yaitu:

1. Kelangsungan ekologi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumberdaya alam yang menjadi daya tarik wisata, seperti

lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan sungai.

2. Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat setempat sebagai identitas masyarakat tersebut.
3. Kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.
4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata.

Dengan demikian, menurut Meutia (2004) pengembangan pariwisata (yang berkelanjutan) perlu didukung dengan perencanaan yang matang dan harus mencerminkan tiga dimensi kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan

(sumberdaya alam), dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas hidup. Konsekuensi dari ketiga kepentingan tersebut, pengembangan pariwisata yang berbasiskan lingkungan (sumberdaya alam) harus mampu mendukung terciptanya dua keuntungan sekaligus secara berimbang dan proporsional, yaitu:

1. Keuntungan bagi penduduk lokal (setempat) untuk terlibat dalam usaha pariwisata guna memperoleh penghasilan (*multiplier effect*-nya adalah memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah).
2. Pelestarian terhadap aset wisata yang dimiliki (terpeliharanya kualitas lingkungan sumberdaya alam yang menjadi daya tarik wisata).

Gunawan, dkk. (2000) menyatakan bahwa pengembangan industri pariwisata berkelanjutan berarti mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan/manajemen di seluruh komponen industri pariwisata. Untuk itu perlu dilakukan program-program sebagai

berikut; (1) pengembangan sistem manajemen pariwisata berkelanjutan, (2) pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam, (3) minimisasi dan pengelolaan limbah (4) perencanaan dan pengelolaan tata guna lahan (5) pelestarian sumberdaya alam dan warisan budaya serta (6) pengembangan sistem dan mekanisme keamanan dan keselamatan.

Ekowisata Bahari

Menurut Setiawati (2000), ekowisata didefinisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan peluang usaha, disamping nilai tambah dari sisi ekonomi, pengembangan ekowisata juga memberikan nilai tambah dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman kepada masyarakat untuk lebih menjaga atau menghargai lingkungan agar tidak dirusak.

Ekowisata bahari merupakan konsep pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya pesisir dengan sistem pelayanan jasa lingkungan yang mengutamakan sumberdaya alam pesisir sebagai obyek pelayanan, hal yang paling utama dalam konsep pemanfaatan sumberdaya ekowisata adalah kesesuaian sumberdaya dan daya dukung (*carrying capacity*) yang dapat mendukung kegiatan wisata bahari (Hawkins and Robert, 1997; Yulianda, *et al*, 2010).

Ditjen Pariwisata (1998) memberikan pengertian pariwisata bahari sebagai kegiatan wisata yang berkaitan langsung dengan sumberdaya kelautan, baik di atas permukaan laut maupun kegiatan yang dilakukan di bawah permukaan laut. Jenis-jenis kegiatan yang termasuk di dalamnya berdasarkan pengertian tersebut di antaranya adalah memancing atau *sport fishing*, *snorkling* dan *diving*.

Wisata bahari merupakan suatu kegiatan pengembangan kegiatan pariwisata dengan mengedepankan aspek kelautan (bahari) sebagai atraksi utama. Berbagai kegiatan dapat dikembangkan dalam konsep wisata bahari, seperti disajikan pada Tabel 1. dibawah ini:

Tabel 1. Kegiatan wisata pantai dan bahari yang dapat dikembangkan

Wisata Bahari
1. Rekreasi pantai dan laut
2. Resort/peristirahatan
3. Wisata selam (<i>diving</i>) dan wisata <i>snorkling</i>
4. Selancar, jet ski, <i>banana boat</i> , perahu kaca, kapal selam
5. Wisata ekosistem lamun, wisata nelayan, wisata pulau, wisata pendidikan, wisata pancing
6. Wisata satwa (penyu, duyung, paus, lumba-lumba, burung, mamalia, buaya)

Sumber: Yulianda (2007)

Kawasan Konservasi Perairan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, Pengertian Kawasan konservasi perairan adalah suatu kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan konservasi yang efektif perlu diwujudkan guna memberikan manfaat sosial-ekonomi-budaya bagi masyarakat dan keberlanjutan sumberdaya.

Zonasi Kawasan Konservasi merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya

dan daya dukung serta proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan disebutkan bahwa zonasi dalam kawasan konservasi perairan terdiri dari:

- a. Zona Inti;
- b. Zona Perikanan Berkelanjutan;
- c. Zona Pemanfaatan;
- d. Zona Lainnya.

Zona lainnya merupakan zona di luar Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, dan Zona Pemanfaatan yang karena fungsi dan

kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu.

HASIL PEMBAHASAN

Profil Kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya

Kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh merupakan salah satu kawasan konservasi perairan nasional yang terletak di Provinsi Sumatera Barat tepatnya di sebelah barat wilayah administratif Kota Padang, Kabupaten Padang dan Pariaman. Sebelum diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, kawasan ini merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dengan fungsi sebagai Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Pulau Pieh yang pengelolaannya berada di bawah Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat Kementerian Kehutanan, melalui SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No: 070/Kpts-II/2000 pada tanggal 28 Maret 2000. Kawasan ini diserahkan dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui berita acara serah terima Nomor BA.01/Menhut-IV/2009 dan Nomor BA.108/MEN.KP/III/2009 pada

tanggal 4 Maret 2009. Kemudian kawasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dengan fungsi sebagai Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh dan Laut di sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 70/MEN/2009 tanggal 3 September 2009. Saat ini TWP Pulau Pieh dikelola oleh UPT KKPN Pekanbaru dengan satuan kerja pelaksana teknis lapangan yang ditempatkan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Kawasan ini terdiri dari beberapa pulau, yaitu pulau Bando, Pulau Pieh, Pulau Air, Pulau Toran dan Pulau Pandan serta termasuk beberapa gosong dengan luas kawasan keseluruhan mencapai 39.900 Ha. Pulau Pieh jaraknya dari daratan Kabupaten Padang Pariaman ± 17 mil, yang dapat ditempuh dengan kapal motor selama 2 Jam.

Salah satu hal yang kemudian mendasari ditetapkannya kawasan TWP Pulau Pieh dan Laut di sekitarnya menjadi kawasan yang dilindungi adalah bahwa kawasan ini merupakan habitat penting bagi ekosistem perairan, terutama perairan

dangkal, yaitu ekosistem terumbu karang. Selain itu pulau-pulau kecil yang terdapat di dalam kawasan ini merupakan tempat bertelurnya penyu. Biota penting lain yang terdapat atau bisa ditemui di dalam kawasan adalah hiu, hiu paus, paus, lumba-lumba, kerang seperti kima, lola, dan juga biota lainnya.

Dari hasil kajian review potensi yang dilakukan pada tahun 2014 oleh LIPI, kondisi kesehatan terumbu karang yang dilakukan di TWP Pulau Pieh dan Laut di sekitarnya, diperoleh nilai rerata tutupan karang hidup sebesar 41,88%, sehingga terumbu karangnya berada dalam kondisi cukup baik. TPW Pulau Pieh dan laut di sekitarnya memiliki sebaran habitat laut dangkal yang terdiri dari terumbu karang dan substrat campuran, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Tipe dan Luasan Habitat Perairan Dangkal TWP Pulau Pieh

Habitat	Luas (Ha)
<i>Fringing Reef</i>	213,98
<i>Patch Reef</i>	212,11
Tipe Habitat	Luas(ha)
Terumbu Karang	157,02
Substrat Campuran	269,07

Daerah terumbu yang ditutupi makro algae dan padang lamun tidak terlihat, sedangkan daerah pesisir dengan hutan mangrove juga tidak ditemukan. Habitat terumbu karang terdiri dari bagian rataaan terumbu (*fringing reef*) dan gosong karang (*patch reef*) dengan total luasan mencapai 521 ha, terdiri rataan terumbu tanpa ditutupi makro algae dan padang lamun, komunitas karang hidup pada bagian tubir (*reef edge*) dan puncak terumbu (*reef crest*), bagian lain adalah substrat terbuka terdiri dari daratan pulau, substrat dasar perairan seperti pasir dan karang mati.

Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Taman Perairan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya

Rencana pengelolaan dan zonasi kawasan TWP Pulau Pieh dan Laut di sekitarnya telah disahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi TWP Pulau Pieh dan Laut di sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat 2014–2034. Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui sistem

zonasi, sehingga di dalam dokumen rencana pengelolaan kawasan ini memuat zona-zona yang ada dalam kawasan.



Gambar 1. Peta Zonasi TWP Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya

TWP Pulau Pieh dan Laut di sekitarnya dikelola dengan sistem zonasi. Kawasan ini telah dibagi menjadi 4 (empat) zona, yaitu zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya.

Potensi Pengembangan Wisata Bahari Kawasan TWP Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya

Kawasan TWP Pulau Pieh dan Laut sekitarnya memiliki potensi wisata bahari yang potensial untuk dikembangkan. Menurut Pearce (1989), terdapat setidaknya lima unsur yang harus tersedia di dalam upaya pengembangan pariwisata, yaitu:

1. Atraksi wisata.

Atraksi ini dapat berupa keanekaragaman flora dan fauna, bentuk bentang lahan dan keindahan alam lainnya. Keberadaan pulau-pulau kecil dengan pasir putih yang halus dan lembut, keasrian vegetasi alam dengan suasana yang tenang, perairan jernih dan pesona bawah laut yang indah yang dapat dinikmati dengan bersnorkeling maupun *diving* menjadi daya tarik utama. Di dalam kawasan TWP Pulau Pieh dan laut di sekitarnya terdapat 5 (lima) pulau yang kesemuanya termasuk dalam kategori pulau kecil, yaitu Pulau Air, Pulau Pandan, Pulau Toran, Pulau Pieh dan Pulau Bando.

Kondisi daratan pulau pada kawasan TWP Pulau Pieh dan Laut di sekitarnya juga mendukung untuk kegiatan pariwisata. Kondisi alam di atas pulau masih asri dan memiliki aneka vegetasi di antaranya kelapa, bunga melati, bunga angrek, pakis, sukun, ketaping, nipah, daun sirih, rotan (sejenis rotan), batang jawi-jawi (*Vicus, sp*), mengkudu, batang baru dan semak belukar.

2. Transportasi (Aksesibilitas)

Akses menuju TWP ini dapat melalui pelabuhan di Kota Padang,

Kota Pariaman maupun Kabupaten Padang Pariaman. Moda transportasi laut menjadi pilihan utama. Namun sayang, sarana transportasi yang rutin melayani dari dan menuju ke kawasan belum ada. Untuk mencapai kawasan dapat dilakukan dengan menyewa kapal-kapal nelayan maupun kapal wisata (kapal cepat).

3. Akomodasi

Dalam industri pariwisata, dikenal akomodasi komersial yang telah ditentukan, seperti wisma, dan losmen. Di samping itu, juga dikenal akomodasi pribadi yang pemilikannya bisa individu maupun kelompok, seperti *guest house*, *cottage*, serta sewa tenda di lokasi *camping ground*. Akomodasi dalam kawasan TWP ini masih sangat minim. Di Pulau Pieh hanya terdapat rumah jaga bagi para Satuan Kerja Pengelola Kawasan yang dapat dijadikan sebagai rumah singga atau pondok wisata. Selain itu terdapat *shelter* sebagai tempat istirahat bagi para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pieh.



Gambar 2. Rumah Jaga dan Tempat Peristirahatan yang Terdapat di TWP Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya

4. Ketersediaan Fasilitas dan Jasa Lainnya

Termasuk di dalamnya adalah toko-toko souvenir, restoran, fasilitas kesehatan dimana di TWP Pulau Pieh masih belum tersedia.

5. Infrastruktur

Kondisi jalan menuju pelabuhan di kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan akses menuju TWP Pulau Pieh relatif sudah bagus dengan kondisi aspal yang sudah baik begitu pula transportasi menuju ke pelabuhan-pelabuhan tersebut sudah ada trayeknya, bahkan untuk salah satu pintu masuk menuju TWP Pulau Pieh dan laut sekitarnya sudah terdapat akses kereta api yang sudah terjadwal setiap harinya.

Selain itu, lembaga masyarakat belum terbentuk secara khusus

menangani Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh dan laut di sekitarnya. Hanya terdapat lembaga adat yang bersifat kekeluargaan di mana sumberdaya manusia yang terdapat di dalamnya lebih kepada keluarga yang masih memiliki hak ulayat di pulau tersebut atau secara turun temurun telah memelihara pulau tersebut.

Pengembangan Wisata Bahari TWP Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya

Pengembangan wisata bahari perlu dikelola dengan konsep ekowisata, yaitu bentuk wisata yang menekankan tanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya alam, mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat dalam menikmati keindahan alam dengan cara tidak merusak sumberdaya alam sehingga keberadaannya tetap lestari. Pengelolaan Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan laut sekitarnya telah dilakukan dengan sistem zonasi agar fungsi konservasi kawasan dapat diwujudkan guna memberikan manfaat sosial-ekonomi-budaya bagi masyarakat dan keberlanjutan sumberdaya.

Pengaturan sistem zonasi dalam pengelolaan kawasan konservasi, hak-hak masyarakat dapat dijamin melalui pengaturan alokasi ruang dalam zonasi di kawasan konservasi yang diakui dalam rencana pengelolaan kawasan konservasi. Masyarakat diberikan ruang pemanfaatan untuk perikanan di dalam kawasan konservasi (zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, maupun zona lainnya), misalnya untuk budidaya dan penangkapan ramah lingkungan maupun pariwisata bahari dan lain sebagainya.

Selain itu, untuk menjamin kelestarian kawasan, penilaian terhadap daya dukung kawasan (*carrying capacity*) juga harus diperhatikan. Daya dukung kawasan meliputi daya dukung secara ekologis, daya dukung secara fisik dan daya dukung secara sosial. Untuk menjaga keaslian lingkungan pantai, aspek pendidikan konservasi juga perlu dilakukan terhadap wisatawan (pengunjung), di antaranya dengan memasang papan-papan peringatan di kawasan konservasi. Program-program peduli lingkungan seperti penangkaran penyus merupakan salah satu upaya

konservasi sederhana. Monitoring terhadap kawasan dan pengunjung juga harus dilakukan secara kontinyu agar keberadaan pengunjung tidak melebihi daya dukung kawasan.

Peningkatan pembangunan sarana prasarana pendukung juga perlu dilakukan, seperti fasilitas kesehatan dan toko souvenir agar dapat menjamin kepuasan pengunjung/wisatawan. Kemudahan akses juga perlu ditingkatkan dengan menyediakan sarana transportasi yang rutin melayani dari dan menuju ke kawasan dengan dukungan Pemerintah. Memelihara kerjasama dengan lembaga adat dan melibatkan masyarakat yang tersebar di zona penyangga kawasan TWP juga penting dilakukan.

Dalam rangka pengelolaan kawasan TWP ini beberapa prinsip dasar yang perlu dikembangkan adalah:

1. Prinsip *co-ownership*

Kesepahaman bersama antara lembaga adat, masyarakat dan pengelola kawasan bahwa pada hakikatnya potensi wisata bahari dan kekayaan alam yang berada di dalam kawasan TWP Pulau Pieh merupakan karunia Tuhan yang harus dijaga kelestariannya. Sehingga hak-

hak masyarakat di dalamnya tetap diakui dan perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam dapat dilakukan bersama.

2. Prinsip *co-management*

Pengelolaan kawasan konservasi memerlukan kerjasama dengan masyarakat yang tinggal di kawasan penyangga taman nasional. Pengelolaan kawasan dilakukan bersama-sama seluruh komponen masyarakat (*stakeholder*) yang terdiri dari pemerintah, masyarakat dan organisasi non pemerintah (LSM).

3. Prinsip *co-responsibility*

Keberadaan kawasan TWP Pulau Pieh menjadi tanggung jawab bersama karena pengelolaan kawasan wisata bahari merupakan tujuan bersama. Ketiga prinsip tersebut dilaksanakan secara terpadu, sehingga perlindungan ekosistem kawasan konservasi diharmonisasikan dengan pemanfaatan ekonomi masyarakat pesisir. Dengan demikian tercipta pola pengelolaan yang mengedepankan prinsip keberpihakan terhadap ekonomi lokal yang menyejahterakan dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan sumberdaya pesisir, laut

dan pulau-pulau kecil. Manfaat langsung pariwisata bahari dapat menjadi sumber pendanaan jasa lingkungan bagi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

KESIMPULAN

1. Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk menjadi tujuan wisata bahari terbesar di dunia, dengan basis *Marine Ecotourism*. Sebagian besar potensi wisata bahari masih belum dikembangkan secara optimal, salah satunya wisata bahari di kawasan TWP Pulau Pieh dan laut sekitarnya.
2. Kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh dan laut sekitarnya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 70/MEN/2009 tanggal 3 September 2009. Kawasan ini memiliki luas 39.000 Ha dan merupakan kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi. Rencana pengelolaan dan zonasi kawasan TWP Pulau Pieh dan laut di sekitarnya telah disahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi TWP Pulau Pieh dan Laut di sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat, 014 – 2034.
3. Kawasan TWP Pulau Pieh memiliki potensi wisata bahari yang dapat dikembangkan. Salah satunya memiliki atraksi alam yang menarik. Terdapat 5 (lima) pulau-pulau kecil, yaitu Pulau Air, Pulau Pandan, Pulau Toran, Pulau Pieh dan Pulau Bando yang memiliki, perairan jernih dan pesona bawah laut yang indah yang dapat dinikmati dengan ber-*snorkeling* maupun *diving*. Namun demikian aksesibilitas, saran prasarana pendukung perlu ditingkatkan agar meningkatkan kepuasan wisatawan.
4. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan TWP Pulau Pieh difokuskan untuk tujuan wisata bahari berbasis ekowisata atau pariwisata yang ramah lingkungan, dengan memperhatikan aspek *co-ownership*, *co-management*,

co-responsibility sehingga perlindungan ekosistem kawasan konservasi diharmonisasikan dengan pemanfaatan pariwisata bahari.

SARAN

Dengan adanya potensi sumberdaya alam yang baik, diharapkan pemerintah daerah berperan aktif dalam mengelola serta memasarkan potensi pada pulau tersebut. Hal utama adalah membangun dan mengoptimalkan sarana-prasarana penunjang kegiatan wisata bahari di lokasi studi, serta menggandeng pihak swasta yang ingin mengembangkan pulau tersebut menjadi Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang memiliki konsep ekowisata

DAFTAR PUSTAKA

Bjork P. 2000. *Ecotourism from a Conceptual perspective, an extended definition of a unique tourism form*. Swedish School of Economic and Business Administration, P.O. Box 287, FIN-65101 VASA, Finland. *International Journal of Tourism Research*. 2(1):189-202.

COREMAP LIPI. 2014. *Laporan Monitoring (Baseline) Kesehatan Ekosistem Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Lainnya Taman Wisata Perairan (TWP)*

Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya. Publikasi LIPI. Jakarta

Ditjen Pariwisata Direktorat Jenderal Pariwisata. 1998. *Pedoman Pengembangan Ekowisata*. Jakarta: Ditjen Pariwisata.

Gunawan M.P. dkk. 2000. *Agenda 21 Sektoral : Agenda Pariwisata untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan*. UNDP-Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.

Hidayat, S.,. 2000. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Perilaku Elit Lokal*. Tulisan dalam buku "Indonesia menapak Abad 21" Kajian Ekonomi Politik. <http://maritimemagz.com/membangun-pulau-pulau-kecil-berbasis-marine-ecotourism/diakses-17-April-2016>.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomer. Kep. 70/Men/2009 tentang Kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor38/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi TWP Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat 2014–2034.

Meutia. 2004. *Analisis Pengembangan Daerah Tujuan Wisata di Pulau Weh Sabang [Skripsi]*. Jakarta: Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.

- Purwanto. 2002. *Jurnal ilmiah Pariwisata Volume 7*. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Ekowisata di Daerah.
- Ramly, N. 2007. *Pariwisata Berwawasan Lingkungan*. Grafindo Khazanah Ilmu. Jakarta.
- Ruchimat, dkk. 2012. *Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*; Paradigma, Perkembangan dan Pengelolaannya. Publikasi Ditjen KP3K KKP. Jakarta.
- Setiawati, I. 2000. *Pengembangan Ekowisata Bahari*. Prosiding pelatihan untuk pelatih pengelolaan wilayah pesisir terpadu Bogor, 21 – 26 Februari 2000. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB). Bogor.
- Sulaksmi, R. 2007. *Analisis Dampak Pariwisata terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh Kota Sabang*. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana IPB.
- Yulianda, F. 2007 *Ekowisata Bahari sebagai Alternatif Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Berbasis Konservasi*. Disampaikan pada Seminar Sain pada Departemen MSP, FPIK IPB.
- Yulianda F., A. Fahrudin, L. Adrianto, A.A. Hutabarat, S. Harteti, Kusharjani dan H.S. Kang. 2010. *Kebijakan Konservasi Perairan Laut dan Nilai Valuasi Ekonomi*. Pusdiklat Kehutanan Departemen Kehutanan RI. SECEM-Korea Internasional Cooperation Agency, Bogor.